



Efektivitas Komunikasi Publik DPD RI dalam Membangun Citra Kelembagaan di Era Digital

Diah Anggraeni¹

¹Universitas Al Azhar Indonesia

E-mail: odieoktober@yahoo.com¹

Article Info

Article history:

Received June 20, 2025

Revised June 30, 2025

Accepted July 05, 2025

Keywords:

Communication, Digital Age, SDGs, DPD RI, Social Media.

ABSTRACT

Public communication plays an increasingly important role in building and maintaining a positive institutional image, especially in today's digital era. This study aims to analyze the effectiveness of public communication of the House of Regional Representative of the Republic of Indonesia (DPD RI) in building institutional image in the digital era. The research method used is descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with DPD RI officials and content analysis of DPD RI's official social media. The results showed that DPD RI has utilized various digital platforms, such as social media, official websites, and mobile applications, to convey information to the public. The use of social media has proven effective in increasing public interaction and involvement in the issues raised by DPD RI. However, challenges such as consistent content management and responsiveness to public feedback are still an obstacle in achieving optimal communication. The conclusion of this paper is that the effectiveness of DPD RI's public communication in building an institutional image in the digital era is highly dependent on a planned and integrated communication strategy, as well as the ability to adapt to changes in technology and communication trends. Recommendations from this research are to increase the capacity of human resources in digital media management and develop a more responsive and participatory communication strategy.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received June 20, 2025

Revised June 30, 2025

Accepted July 05, 2025

Keywords:

Komunikasi, Era Digital, SDGs, DPD RI, Media Sosial.

ABSTRACT

Komunikasi publik memainkan peran yang semakin penting dalam membangun dan mempertahankan citra kelembagaan yang positif terutama dalam era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas komunikasi publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam membangun citra kelembagaan di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pejabat DPD RI dan analisis konten dari media sosial resmi DPD RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD RI telah memanfaatkan berbagai platform digital, seperti media sosial, situs web resmi, dan aplikasi mobile, untuk menyampaikan informasi kepada publik. Penggunaan media sosial terbukti efektif dalam meningkatkan interaksi dan keterlibatan masyarakat terhadap isu-isu yang diangkat oleh DPD RI. Namun, tantangan seperti pengelolaan konten yang konsisten dan responsivitas terhadap umpan balik publik masih menjadi kendala dalam mencapai komunikasi yang optimal. Kesimpulan dari makalah ini adalah



bahwa efektivitas komunikasi publik DPD RI dalam membangun citra kelembagaan di era digital sangat bergantung pada strategi komunikasi yang terencana dan terintegrasi, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren komunikasi. Rekomendasi dari penelitian ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan media digital dan pengembangan strategi komunikasi yang lebih responsif dan partisipatif.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Diah Anggraeni
Universitas Al Azhar Indonesia
E-mail: odieoktober@yahoo.com¹

Pendahuluan

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga tinggi negara, DPD RI memegang mandat untuk mewakili kepentingan daerah dalam proses legislasi di tingkat nasional. Pembentukan DPD RI melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk memperkuat prinsip otonomi daerah dan memastikan bahwa suara dari setiap provinsi di Indonesia mendapatkan perhatian yang setara dalam pengambilan keputusan nasional. Namun, meskipun memiliki peran strategis, DPD RI masih menghadapi berbagai tantangan dalam membangun citra kelembagaan yang kuat dan mendapatkan pengakuan yang layak dari publik.

Sejak berdirinya, DPD RI diharapkan menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berdampak langsung pada daerah, hingga memberikan pertimbangan terhadap kebijakan fiskal nasional. Namun, dalam implementasinya, DPD RI sering kali dianggap memiliki keterbatasan wewenang dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang memegang kekuasaan legislatif lebih dominan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi publik terhadap efektivitas dan relevansi DPD RI dalam sistem politik Indonesia.

Di era digital, tantangan yang dihadapi DPD RI dalam membangun citra kelembagaan semakin kompleks. Perubahan teknologi informasi telah merevolusi cara komunikasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat. Media sosial, situs web, dan berbagai platform digital lainnya menjadi saluran utama dalam penyebaran informasi dan interaksi dengan publik. Kondisi ini menuntut DPD RI untuk tidak hanya mengandalkan metode komunikasi konvensional, tetapi juga mengadopsi strategi komunikasi digital yang lebih dinamis, interaktif, dan transparan. Keberhasilan dalam mengelola komunikasi publik melalui media digital dapat menjadi kunci dalam membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPD RI.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas komunikasi publik DPD RI dalam upayanya membangun citra kelembagaan di era digital. Fokus penelitian mencakup strategi yang diterapkan oleh DPD RI dalam memanfaatkan media digital, implementasi dari



strategi tersebut, serta dampaknya terhadap persepsi publik. Dalam konteks ini, efektivitas komunikasi diukur dari sejauh mana pesan yang disampaikan dapat dipahami, diterima, dan mempengaruhi persepsi serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi DPD RI dalam membangun hubungan yang konstruktif dengan publik melalui komunikasi digital.

Signifikansi penelitian ini terletak pada urgensi penguatan citra DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah yang kredibel dan relevan di mata masyarakat. Dalam sistem demokrasi, legitimasi lembaga negara sangat bergantung pada kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang peran dan fungsi DPD RI menjadi penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, terutama dalam hal pengawasan terhadap kebijakan yang berdampak pada daerah. Citra yang kuat dan positif dari DPD RI tidak hanya akan memperkuat posisi lembaga ini dalam sistem ketatanegaraan, tetapi juga akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

Dalam membangun citra kelembagaan di era digital, DPD RI perlu memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, konsistensi dalam menyampaikan pesan yang sesuai dengan nilai-nilai institusi dan aspirasi masyarakat. Konsistensi ini mencakup keselarasan antara visi dan misi DPD RI dengan konten yang disampaikan melalui berbagai platform digital. Kedua, transparansi dalam setiap aktivitas kelembagaan. Transparansi ini tidak hanya mencakup penyampaian informasi secara terbuka, tetapi juga memberikan akses kepada publik untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, keterlibatan aktif dengan masyarakat. Interaksi dua arah yang dibangun melalui media sosial dan platform digital lainnya dapat memperkuat hubungan antara DPD RI dan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.

Tantangan lain yang dihadapi DPD RI dalam membangun citra kelembagaan di era digital adalah penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Dalam menghadapi tantangan ini, DPD RI perlu memiliki strategi yang efektif untuk mengelola dan merespons disinformasi yang dapat merusak reputasi lembaga. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan literasi digital masyarakat, sehingga mereka dapat lebih kritis dalam menerima dan memverifikasi informasi. Selain itu, DPD RI juga perlu bekerja sama dengan platform media sosial dan lembaga terkait untuk memantau dan mengatasi penyebaran informasi yang menyesatkan.

Kerjasama dengan media massa juga menjadi aspek penting dalam strategi komunikasi publik DPD RI. Media massa memiliki peran sebagai jembatan antara lembaga pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, membangun hubungan yang baik dengan media, baik di tingkat nasional maupun lokal, dapat membantu memperkuat pesan yang ingin disampaikan oleh DPD RI. Hubungan yang saling menguntungkan dengan jurnalis dan praktisi media dapat memastikan bahwa informasi mengenai kinerja dan kontribusi DPD RI disampaikan secara objektif dan diterima dengan baik oleh publik.

Dalam konteks inovasi, DPD RI juga dapat memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik. Penggunaan kecerdasan buatan untuk analisis data, virtual reality untuk presentasi interaktif, dan aplikasi mobile untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat adalah beberapa contoh bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperkuat hubungan dengan publik. Inovasi ini tidak hanya membantu meningkatkan efisiensi dalam penyampaian informasi, tetapi juga menunjukkan bahwa DPD RI adalah lembaga yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kerangka Pemikiran



1) Komunikasi Publik dan Citra Kelembagaan

Komunikasi publik merupakan proses penyampaian pesan dari organisasi kepada khalayak luas dengan tujuan mempengaruhi opini dan perilaku publik. Menurut Grunig dan Hunt (1984), komunikasi publik yang efektif harus menerapkan model two-way symmetric communication, di mana terjadi dialog dua arah antara organisasi dan publiknya. Dalam konteks kelembagaan, Doorley dan Garcia (2015) menekankan bahwa citra institusi terbentuk melalui akumulasi persepsi publik yang dipengaruhi oleh komunikasi, tindakan, dan performansi organisasi.

2) Digital Public Relations

Era digital telah melahirkan konsep Digital Public Relations (Digital PR) yang mengintegrasikan teknologi digital dalam strategi komunikasi publik. Phillips dan Young (2009) mengemukakan bahwa Digital PR memungkinkan organisasi untuk membangun hubungan yang lebih personal dan interaktif dengan stakeholders. Paradigma ini menekankan pentingnya transparansi, responsivitas, dan engagement dalam komunikasi digital.

3) Institutional Branding di Era Digital

Kapferer (2012) mengembangkan konsep institutional branding yang menekankan pentingnya konsistensi antara identitas, komunikasi, dan aksi organisasi dalam membangun merek institusi yang kuat. Di era digital, institutional branding harus mempertimbangkan karakteristik media baru seperti interaktivitas, multiplatform, dan real-time communication.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Desain penelitian explanatory sequential digunakan untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang efektivitas komunikasi publik DPD RI. Data dikumpulkan melalui beberapa metode analisis konten dan studi dokumen. Data kualitatif dianalisis menggunakan pendekatan studi dokumen. Triangulasi data dilakukan untuk memastikan validitas temuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Di era digital yang semakin berkembang, efektivitas komunikasi publik menjadi kunci dalam membangun dan mempertahankan citra positif bagi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Peran DPD RI sebagai representasi daerah di tingkat nasional menuntut adanya strategi komunikasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika digitalisasi informasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunita Fransisca (2021) menyoroti aktivitas humas DPD RI dalam membangun citra organisasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa humas DPD RI telah melakukan berbagai strategi, seperti memberikan informasi yang transparan, melakukan kunjungan perusahaan (*company visit*), pameran, dan memperkenalkan organisasi melalui media sosial. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan, seperti kurangnya sumber daya manusia, yang mengakibatkan minimnya kegiatan kehumasan.

Dalam konteks penguatan komunikasi reputasi kelembagaan, Muhammad Wildan Adi Kara (2024) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi reputasi DPD RI sebagai lembaga tinggi negara. Penelitian ini menemukan bahwa pengorganisasian kelembagaan yang tidak terkonsolidasi antar lini keanggotaan, pemanfaatan media yang tidak optimal, serta kurangnya aktivitas dan keterlibatan komunikasi antara anggota dan konstituen menjadi faktor penghambat dalam penguatan reputasi DPD RI. Sebagai rekomendasi, peneliti mengusulkan



model komunikasi untuk penyelarasan dan pengkonsolidasian antar lini keanggotaan DPD RI dan kesekretariatan dalam upaya penguatan reputasi lembaga.

Peran humas dalam mengelola citra positif lembaga legislatif juga diulas oleh Ida Royandiah dan rekan-rekannya (2022). Mereka menyoroti pentingnya humas dalam menciptakan citra organisasi dan mengkomunikasikan informasi kepada publik. Dalam kasus DPR RI, penurunan elektabilitas dan citra negatif di mata masyarakat menjadi tantangan yang harus diatasi melalui peningkatan kinerja dan peran humas yang lebih proaktif.

Dalam upaya membangun citra kelembagaan di era digital, DPD RI perlu mengadopsi strategi komunikasi yang efektif dengan memanfaatkan teknologi digital. Penggunaan media sosial, situs web resmi, dan platform digital lainnya menjadi sarana penting untuk menyampaikan informasi secara transparan dan interaktif kepada publik. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kehumasan dan komunikasi digital menjadi krusial untuk memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat.

Kolaborasi dengan media massa dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi strategi penting dalam membangun citra positif. Melalui kerjasama yang baik dengan media, DPD RI dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipercaya, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga.

Selain itu, evaluasi berkala terhadap strategi komunikasi yang diterapkan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan bahwa pendekatan yang digunakan tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat.

Secara keseluruhan, efektivitas komunikasi publik DPD RI dalam membangun citra kelembagaan di era digital bergantung pada kemampuan lembaga untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, DPD RI dapat memperkuat reputasinya sebagai lembaga perwakilan daerah yang kredibel dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, efektivitas komunikasi publik DPD RI tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis dalam mengelola saluran komunikasi digital, tetapi juga oleh konsistensi dalam menyampaikan pesan yang selaras dengan nilai-nilai institusi dan aspirasi masyarakat. Keberhasilan komunikasi publik DPD RI sangat bergantung pada seberapa baik lembaga ini mampu mendengarkan dan merespons kebutuhan konstituen di seluruh daerah Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal, DPD RI memiliki peluang besar untuk memperpendek jarak antara lembaga negara dan masyarakat, sehingga tercipta hubungan yang lebih dekat, terbuka, dan akuntabel.

Salah satu aspek penting dalam membangun citra kelembagaan yang positif adalah transparansi. Di era digital, masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan mengevaluasi kinerja lembaga pemerintah. Oleh karena itu, DPD RI harus memastikan bahwa semua aktivitasnya, baik di tingkat legislatif maupun pengawasan, diinformasikan secara jelas dan terbuka kepada publik. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Ketika masyarakat merasa terlibat dan didengar, mereka cenderung memiliki pandangan yang lebih positif terhadap lembaga yang mewakili mereka.

Selain transparansi, keterlibatan atau engagement dengan masyarakat juga menjadi kunci utama dalam membangun citra positif. Media sosial dan platform digital lainnya memungkinkan DPD RI untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, menjawab



pertanyaan, menanggapi kritik, dan mendengarkan masukan. Interaksi dua arah ini penting untuk menciptakan hubungan yang dinamis antara DPD RI dan publik. Melalui keterlibatan yang aktif, DPD RI dapat menunjukkan bahwa mereka bukan hanya lembaga yang bekerja di balik meja, tetapi juga institusi yang benar-benar peduli dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Namun, efektivitas komunikasi publik tidak hanya bergantung pada teknologi dan alat komunikasi yang digunakan, tetapi juga pada kualitas pesan yang disampaikan. Pesan yang jelas, konsisten, dan relevan sangat penting untuk memastikan bahwa publik memahami dan menerima informasi dengan baik. Oleh karena itu, DPD RI perlu mengembangkan narasi yang kuat tentang peran dan kontribusi mereka dalam pembangunan nasional, serta bagaimana mereka memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Narasi ini harus disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing daerah agar lebih relevan dan mudah diterima oleh masyarakat.

Selanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi juga menjadi faktor krusial dalam memperkuat efektivitas komunikasi publik DPD RI. Staf humas dan komunikasi harus dibekali dengan keterampilan digital yang mumpuni, termasuk dalam penggunaan media sosial, analisis data, dan manajemen krisis komunikasi. Selain itu, pelatihan tentang bagaimana membangun narasi yang efektif dan berkomunikasi dengan berbagai segmen masyarakat juga perlu diberikan secara rutin. Dengan tim yang kompeten, DPD RI dapat memastikan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan.

Tidak kalah pentingnya adalah evaluasi berkala terhadap strategi komunikasi yang diterapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dari setiap kampanye komunikasi, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan menyesuaikan strategi sesuai dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan pendekatan yang berbasis data, DPD RI dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam merancang dan mengimplementasikan strategi komunikasi yang efektif.

Tantangan lain yang dihadapi dalam membangun citra kelembagaan di era digital adalah penyebaran informasi yang salah atau hoaks. Dalam konteks ini, DPD RI harus memiliki strategi yang efektif untuk mengelola dan merespons disinformasi yang dapat merusak reputasi lembaga. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan literasi digital masyarakat, sehingga mereka dapat lebih kritis dalam menerima dan memverifikasi informasi. Selain itu, DPD RI juga perlu bekerja sama dengan platform media sosial dan lembaga terkait untuk memantau dan menangani penyebaran informasi yang tidak akurat.

Kemitraan strategis dengan media massa juga menjadi bagian penting dalam membangun citra positif. Media memiliki peran sebagai jembatan antara DPD RI dan masyarakat, sehingga hubungan yang baik dengan media dapat membantu memperkuat pesan yang ingin disampaikan. DPD RI perlu memastikan bahwa mereka memiliki akses yang baik ke media nasional dan lokal, serta membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan jurnalis dan praktisi media. Dengan demikian, informasi tentang kinerja dan kontribusi DPD RI dapat tersebar secara luas dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan era digital, DPD RI juga perlu mengadopsi pendekatan yang inovatif dalam komunikasi publik. Penggunaan teknologi terbaru, seperti kecerdasan buatan untuk analisis data, virtual reality untuk presentasi interaktif, dan aplikasi mobile untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat, dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan komunikasi publik. Inovasi ini tidak hanya membantu memperkuat citra



kelembagaan, tetapi juga menunjukkan bahwa DPD RI adalah lembaga yang modern dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Akhirnya, membangun citra kelembagaan yang kuat di era digital memerlukan komitmen jangka panjang dari seluruh elemen dalam DPD RI. Semua anggota dan staf harus memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya komunikasi publik dan bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Dengan strategi yang terintegrasi, penggunaan teknologi yang tepat, dan keterlibatan aktif dengan masyarakat, DPD RI dapat memperkuat citra mereka sebagai lembaga yang transparan, akuntabel, dan terpercaya di mata publik. Keberhasilan dalam membangun citra kelembagaan ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi DPD RI dalam sistem politik nasional sebagai perwakilan daerah yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi publik DPD RI di era digital telah menunjukkan perkembangan positif dalam membangun citra kelembagaan, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan. Efektivitas komunikasi digital terlihat dari peningkatan pemahaman dan persepsi publik terhadap peran dan fungsi DPD RI. Namun, tantangan dalam konsistensi, interaktivitas, dan integrasi komunikasi masih perlu diatasi untuk mencapai hasil yang optimal.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi untuk peningkatan efektivitas komunikasi publik DPD RI yaitu:

1. Pengembangan strategi komunikasi digital yang lebih terintegrasi dan terukur
2. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan komunikasi digital
3. Penguatan mekanisme engagement dengan stakeholder melalui platform digital
4. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi komunikasi publik yang komprehensif
5. Peningkatan kolaborasi dengan media dan influencer digital dalam memperluas jangkauan komunikasi

Daftar Pustaka

- Doorley, J., & Garcia, H. F. (2015). *Reputation Management: The Key to Successful Public Relations and Corporate Communication*. Routledge.
- Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). *Managing Public Relations*. Holt, Rinehart, and Winston.
- Kapferer, J. N. (2012). *The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking*. Kogan Page.
- Kara, M. W. A. (2024). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Reputasi DPD RI sebagai Lembaga Tinggi Negara*. Jurnal Politik dan Pemerintahan, 12(3), 78-92.
- Phillips, D., & Young, P. (2009). *Online Public Relations: A Practical Guide to Developing an Online Strategy in the World of Social Media*. Kogan Page.
- Royandiah, I., et al. (2022). *Peran Humas dalam Membangun Citra Positif Lembaga Legislatif*. Jurnal Komunikasi, 10(2), 123-135.
- Yunita, F. (2021). *Strategi Humas DPD RI dalam Membangun Citra Kelembagaan di Era Digital*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 9(1), 45-60.